



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. H. Agus Salim

Telp. (0756) 21005 PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 900/02 /BPKD-PS/2018

TENTANG

PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa agar tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada diktum a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Peresiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/36/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangannya;
2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan :
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagian Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Subag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 11 Januari 2017

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN
KEPALA



SUHANDRI, SE.MM
NIP.19700608 200212 1 003

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bank Nagari cabang di Painan
4. Kabid dilingkungan BPKD Kab. Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 900.1/D2./BPKD-PS/2018
 TANGGAL : 11 JANUARI 2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PELAJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
 : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	PANGKAT / GOL	JABATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	Sekretariat				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	E M R I, SH Nip. 19640606 199308 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	PPTK	1. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 3. Penyediaan Makanan dan Minuman 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 8. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Pengembangan Pemasararan Pariwisata 11. Pelaksanaan Festival langkaisu Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 12. Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	
2	RIO PRATAMA, A.Md NIP. 19870420 201101 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengadministrasian Keuangan	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari 3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari 4. Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari	
II	BIDANG ANGGARAN					
1	YULI ASTUTI, SPT	Penata (III/c)	Kasubbid Penyusunan Anggaran	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
2	DESMARNI NIP. 19610905 198603 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbid Evaluasi Anggaran	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusun DPA SKPD 2. Penyusun DPA Perubahan SKPD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota 3. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	

3	ROSZA LESTARI, SE NIP. 19780920 200701 2 007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Perenc. & Kebijakan Anggaran	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Standar Biaya 2. Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD	
III BIDANG PERBENDAHARAAN						
1	SUSMIYAR DERITA, AMd NIP. 19720111 200312 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Perbendaharaan & Verifikasi	PPTK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan	
2	LUSIANA, S.kom, MM	Penata (III/c)	Kasubbid Informasi Keuangan Daerah	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Bimbingan Teknis Belanja Non Tunai	
3	FITRI HANDAYANI, A.Md NIP. 19810803 200501 2 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Pengelolaan Kas Umum Daerah	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD 2. Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah 3. Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah 4. Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Kas Daerah	
IV BIDANG BMD & AKUNTANSI						
1	WILLY SUSFARELA, SE NIP. 19790404 200312 2 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Perenc. & Pengendalian BMD	PPTK	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Penghapusan Barang-Barang Inventaris 3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	
2	INTAN NOVIA F. NANDA, SE,AK NIP. 19841111 200902 2 008	Penata (III/c)	Kasubbid Akuntansi	PPTK	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 3. Peningkatan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 6. Pembinaan Laporan Keuangan OPD 7. Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
3	RENI DAHLIA, SE NIP. 19730130 200701 2 004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Penatausahaan & Pelaporan BMD	PPTK	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2. Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	

Painan, 17 Januari 2018
Kepala

SUHANDRI, SE., MM
NIP. 19700608 200212 1 003